

## **Kebijakan Anti Korupsi di Seluruh Dunia**

### **I. TUJUAN**

Undang-undang sebagian besar negara di dunia menetapkan bahwa membayar atau menawarkan pembayaran atau bahkan menerima suap, *kickback* atau pun bentuk pembayaran lain yang korup adalah suatu tindak pidana yang dapat menjadikan Eaton maupun para pegawai secara individu dapat dikenai denda dan/atau hukuman penjara. Undang-undang anti korupsi ini, termasuk Peraturan Praktik Korupsi di Luar Negara Amerika Serikat (FCPA), menjadikan pembayaran, penawaran atau pemberian segala sesuatu yang bernilai kepada pejabat pemerintah asing, partai politik negara asing (atau oleh karena itu pengurusnya) atau calon pejabat negara asing, dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan para pejabat, partai atau calon pejabat sebagai suatu tindak pidana. Demikianlah sesungguhnya bahkan jika pembayaran semacam itu merupakan hal yang umum dilakukan di negara tersebut.

Tujuan Kebijakan ini adalah untuk memastikan agar semua pegawai, pejabat dan direktur Eaton, serta semua anak perusahaan dan afiliasi Eaton patuh terhadap FCPA dan undang-undang anti korupsi terkait dari negara-negara lain tempat Perusahaan ini berbisnis atau berniat untuk melakukan bisnis. Kebijakan ini mencakup hal-hal berikut ini:

- Suap, *Kickback* atau Pembayaran Korup Lain
- Pembayaran Fasilitasi
- Hubungan dengan Pihak Ketiga

### **II. RUANG LINGKUP**

Kebijakan ini berlaku bagi semua pegawai, pejabat dan direktur Eaton serta semua anak perusahaan dan afiliasinya di seluruh dunia. Kebijakan ini hendaknya dibaca bersama dengan Kode Etik Eaton dan Kebijakan Hadiah dan Hiburan di Seluruh Dunia.

### **III. KEBIJAKAN**

#### **Suap, *Kickback* atau Bentuk Pembayaran Korup Lain**

Merupakan kebijakan Eaton bahwa, dalam melakukan bisnis di mana pun di dunia, Eaton, semua afiliasi, pegawai, pejabat dan direktur Eaton atau semua afiliasinya, dan semua orang yang bertindak sebagai perwakilan, agen, atau penasihat bagi Eaton atau pun afiliasinya, harus sepenuhnya mematuhi undang-undang anti korupsi

yang berlaku, terutama FCPA. Dalam situasi apa pun para pegawai Eaton dilarang untuk secara langsung maupun tidak langsung menawarkan, memberi, meminta, atau menerima segala bentuk suap, *kickback* atau pembayaran korup lain, atau sesuatu yang bernilai, kepada atau dari seseorang atau organisasi, termasuk badan-badan pemerintah, pejabat pemerintah secara individu, perusahaan swasta dan para pegawai perusahaan swasta tersebut.

Larangan ini berlaku,

- di seluruh dunia, tanpa pengecualian;
- tanpa mempertimbangkan kebiasaan setempat, praktik-praktik lokal atau kondisi kompetitif; dan
- bagi pembayaran tidak langsung untuk suap, *kickback* pembayaran korup lain yang mungkin dilakukan melalui pihak ketiga, seperti perwakilan, konsultan, pialang, kontraktor, pemasok, mitra kerja sama atau afiliasi, atau perantara atau agen lain yang bertindak atas nama Eaton.

Pegawai tidak akan dikenai hukuman untuk keterlambatan atau kerugian bisnis sebagai akibat penolakannya untuk melakukan penyuapan.

### **Pihak Ketiga**

Kebijakan ini melarang berbagai penawaran, janji dan pembayaran korup yang dilakukan melalui rekanan, agen perantara, mitra kerja sama, atau pihak ketiga. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan uji tuntas (*due diligence*) terhadap para rekanan atau agen, dan tidak mengenyampingkan atau mengabaikan fakta-fakta yang memberi indikasi adanya kemungkinan bahwa suatu pembayaran korup bisa terjadi. Tujuan uji tuntas adalah untuk memastikan, sejauh mungkin, bahwa Eaton hanya menggunakan agen, perwakilan dan rekanan yang bereputasi baik dan jujur. Selain itu, kontrak-kontrak dengan para agen atau perwakilan pihak ketiga dan mitra kerja sama seharusnya, sejauh mungkin, mencakup ketentuan-ketentuan untuk memperkecil risiko potensi pembayaran yang tidak sah.

### **Pembayaran Fasilitas**

Walaupun undang-undang AS memperbolehkan dilakukannya pembayaran fasilitas (asalkan pembayaran tersebut dilaporkan sebagaimana mestinya dalam catatan keuangan perusahaan), pembayaran semacam itu tidak legal menurut undang-undang setempat di sebagian besar, jika bukan semua, negara selain AS. Pembayaran fasilitas adalah pembayaran dalam jumlah kecil yang dilakukan untuk menjamin atau mempercepat pelaksanaan tugas kewajiban rutin yang dilakukan oleh petugas pemerintah tingkat administratif negara-negara selain AS. Contoh-contoh pembayaran fasilitas bisa berupa upaya memperoleh ijin rutin untuk pelaksanaan bisnis, pemrosesan visa dan surat perintah kerja, pengadaan jasa pos atau telepon,

atau mempercepat barang-barang yang dikirim dalam melewati bea cukai (dengan asumsi segala persyaratan hukum untuk mendapatkan semua ini telah dipenuhi).

**Eaton melarang pemberian pembayaran fasilitas kecuali** berdasarkan dua syarat berikut ini dan **hanya** jika telah disetujui terlebih dahulu oleh Bagian Hukum Eaton (atau, jika tidak mungkin disetujui terlebih dahulu karena situasinya, harus sesegera mungkin disetujui setelah pembayaran semacam itu dilakukan):

- Tidak dilakukannya pembayaran tersebut akan menimbulkan risiko terhadap kesehatan atau keselamatan atau kesejahteraan mental pribadi pegawai (atau rekan perjalanannya); atau
- Tidak dilakukannya pembayaran tersebut akan mengakibatkan kerugian ekonomis atau biaya yang tidak dapat dihindarkan dan berjumlah besar terhadap Eaton sebagai akibat tidak dilaksanakannya pelayanan wajib oleh pejabat pemerintah yang menurut hukum sebenarnya berhak diterima oleh Eaton, sehingga misalnya pembukaan fasilitas produksi tertunda karena adanya penolakan untuk menyambung jasa saluran air, listrik dan telepon yang sebenarnya berhak didapatkan oleh operasi ini.

### **Pembukuan dan Dokumentasi**

Karena FCPA mensyaratkan agar pembayaran semacam itu hendaknya didokumentasikan sebagaimana mestinya dalam pembukuan dan dokumentasi Eaton, maka pembayaran fasilitas apa pun juga wajib dilaporkan ke pejabat pengawasan Anda dan dicatat sebagai pembayaran fasilitas. Jika tidak dicatat sebagaimana mestinya, bahkan fasilitas yang telah disetujui dan diperbolehkan menurut hukum dapat mengakibatkan kerugian bagi Eaton.

## LAMPIRAN KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DI SELURUH DUNIA

### Contoh-contoh

**Skenario:** Seorang inspektur pemerintah di suatu negara yang sedang berkembang menemukan beberapa pelanggaran kecil dalam keselamatan di fasilitas kita. Dia mengancam untuk menutup fasilitas kita kecuali Anda segera membayar denda saat itu juga.

**Analisis:** Dalam hal ini, segera hubungi Bagian Hukum. Walaupun, tentu saja kita hendak menghindari persoalan birokratis yang tidak perlu, melakukan pembayaran kepada inspektur pemerintah merupakan tindakan yang tidak layak dan mungkin sekali tidak legal.

**Skenario:** Seorang *purchasing manager* menyatakan akan membuat perjanjian pengadaan (*supply agreement*) jangka panjang dengan Eaton, tetapi hanya jika Eaton setuju untuk memberikan “pengembalian” sebagian dari harga pembelian kepada perusahaan yang melakukan pembelian. Apa yang Anda lakukan?

**Analisis:** Jika Anda setuju untuk mengembalikan sebagian dari harga pembelian (dengan asumsi harga neto masih menguntungkan dari segi bisnis) untuk memperoleh perjanjian bisnis tersebut, pastikanlah pengembalian tersebut dibayarkan ke akun yang dimiliki oleh perusahaan pembeli tersebut, dan bukan ke akun pribadi *purchasing manager* tersebut atau pihak ketiga. Jika dihadapkan dengan permintaan yang “tidak wajar” yang menyangkut pembayaran, pengiriman barang, dan lain-lain, gunakanlah pertimbangan yang selayaknya untuk memastikan bahwa permintaan semacam itu memang benar-benar sah, dan bukanlah merupakan kelanjutan dari rencana atau rekayasa yang tidak wajar.

**Skenario:** Eaton sedang berusaha membeli tanah untuk fasilitas barunya di suatu pasar yang sedang berkembang. Tanah tersebut adalah milik pemerintah daerah. Anda diberi tahu seorang pialang lahan (*real estate broker*) bahwa untuk komisi sebesar 25% dari nilai transaksi, dia akan mengatur penjualan lahan tersebut melalui “koneksinya” dengan pemerintah daerah setempat. Apakah Anda membayar komisi tersebut?

**Analisis:** Tidak. Karena komisi yang besar, dan kita mengetahui bahwa pialang tersebut mempunyai koneksi yang dekat dengan pihak pemerintah, maka ada cukup banyak “tanda bahaya” yang mengesankan ada ketidakwajaran dalam transaksi ini.

**Skenario:** Dalam usaha meninggalkan negara yang sedang mengalami kerusuhan, Anda ditahan oleh petugas bea cukai setempat. Petugas tersebut meminta uang untuk “biaya pemrosesan” sejumlah USD 20 untuk meloloskan Anda.

**Analisis:** Dalam kasus ini, Anda boleh membayar biaya tersebut, asalkan Anda segera melaporkan pembayaran tersebut ke Bagian Hukum, dan mendokumentasikan pembayaran tersebut sebagaimana mestinya.

**Skenario:** Seorang pelanggan meminta Anda memberikan dua faktur penjualan (*invoice*) untuk produk-produk yang terjual – satu menunjukkan harga sebenarnya, dan satu lagi menunjukkan harga yang lebih tinggi. Pelanggan tersebut akan membayar bukti penjualan pertama, dan akan menggunakan yang kedua sebagai bukti untuk pembebanan harga yang lebih tinggi dari pengguna akhir. Apakah ini dapat diterima?

**Analisis:** Tidak. Dengan memberikan faktur penjualan kedua dengan harga yang lebih tinggi, Eaton mungkin membantu pelanggan melakukan pemalsuan atau penipuan. Hal ini dapat menjadikan Eaton dikenai tanggung jawab, bahkan jika pelanggan itulah yang menggunakan faktur penjualan tersebut dengan tidak wajar. (Demikian juga adanya jika seorang pelanggan meminta Eaton untuk memberikan salinan faktur penjualan yang menunjukkan harga yang lebih rendah. Jika pelanggan tersebut menggunakan salinan faktur penjualan untuk memperkecil bea pajaknya, Eaton secara hukum dapat dikenai tanggung jawab karena membantu pelanggan tersebut melakukan penggelapan pajak.)

**Skenario:** Suatu pengiriman produk Eaton dalam jumlah besar sedang dalam perjalanan menuju ke pelanggan penting di suatu pasar yang sedang berkembang. Pengiriman ini tertahan di bea cukai karena kontener tidak diberi tanda sebagai sesuatu yang berbahaya sesuai dengan yang tercatat di dalam dokumen pengiriman. Karena penundaan ini kita menghadapi risiko keterlambatan dalam waktu pengiriman. Ekspedisi pihak ketiga memberi tahu bahwa dengan sedikit pembayaran dia dapat meyakinkan petugas bea cukai untuk “memaafkan” penyimpangan ini. Apakah ini gagasan yang baik?

**Analisis;** Tidak. Sebagai pegawai Eaton Anda dilarang melakukan pembayaran semacam ini, dan menggunakan pihak ekspedisi untuk melakukan pembayaran tersebut sama saja dengan jika Anda melakukannya sendiri. Kita tidak meminta pihak lain untuk melakukan sesuatu atas nama kita karena kita dilarang melakukannya sendiri.

**Skenario:** Anda ingin mempekerjakan seorang konsultan agar dapat membantu memperoleh bisnis dari para pelanggan, termasuk dari badan-badan milik pemerintah. Konsultan tersebut meminta pembayaran di muka sebesar \$100.000 untuk biaya "logistik" dan komisi 25% dari kontrak-kontrak yang diperoleh. Konsultan

tersebut tidak berpengalaman dalam bisnis produk Eaton tetapi terkenal sebagai seorang "yang bisa membereskan semuanya." Apakah Anda seyogianya memasuki perjanjian bisnis ini?

**Analisis:** Tidak tanpa adanya uji tuntas (*due diligence*) tambahan dan proteksi yang signifikan terhadap kontrak. Meskipun perjanjian ini *tampaknya* tidak ilegal, terdapat "tanda-tanda bahaya" dalam perjanjian ini yang jika dibiarkan saja tanpa diperiksa Anda dan Perusahaan akan berisiko melakukan pelanggaran terhadap FCPA atau undang-undang anti korupsi lainnya. Bersikaplah sensitif terhadap pembayaran di muka dan/atau komisi untuk pihak ketiga yang tidak wajar, terutama mereka yang akan berurusan secara langsung dengan badan-badan pemerintah dan mereka yang sungguh-sungguh melakukan penjualan "akses." Untuk kepentingan analisa FCPA Anda bisa dianggap sengaja melakukan tindakan tersebut bila Anda dengan sadar mengabaikan fakta-fakta tentang pihak ketiga yang memberikan indikasi akan adanya kemungkinan pembayaran yang korup. Hubungilah Bagian Hukum untuk minta bantuan dalam melaksanakan uji tuntas terhadap agen-agen dan dalam menyiapkan bahasa kontrak yang tepat.

**Skenario:** Anda berniat melakukan kerja sama ("*Joint Venture* atau JV") dengan suatu perusahaan untuk melakukan tender bagi suatu kontrak dari pemerintah di Timur Tengah. Selama negosiasi kontrak mitra JV membeberkan bahwa mitra tersebut mempunyai banyak kontrak dengan pihak-pihak ketiga di negara-negara di mana terdapat praktik-praktik korupsi yang signifikan. Beberapa kontrak tersebut digunakan sebagai "perkenalan" kepada para pejabat pemerintah dan mitra tersebut menyatakan bahwa hal tersebut penting dalam berbisnis di negara tertentu. Dapatkah Anda memasuki perjanjian bisnis ini?

**Analisis:** Tidak tanpa adanya informasi tambahan. Meskipun mitra JV yang diusulkan telah memasuki kontrak-kontrak semacam ini sebelum adanya keterlibatan dengan Eaton, hal ini masih akan tetap menjadi persoalan dari segi hukum dan bisnis.

"Pembayaran untuk perkenalan" ini bisa dipandang sebagai transaksi yang korup. Sebagai bagian dari JV tersebut, Eaton bisa dikenai tanggung jawab hukum menurut FCPA dan undang-undang anti korupsi lainnya – meskipun tidak ada pegawai Eaton yang terlibat dalam transaksi yang korup tersebut.

Dari segi bisnis, keberlangsungan operasi dan nilai bisnis bisa dikenai dampak yang tidak diinginkan jika mitra JV tersebut atau agennya bertindak korup di masa lalu dalam memperoleh bisnis dari pemerintah atau keputusan yang menguntungkan dari pemerintah.

Sebelum memasuki perjanjian *joint venture*, hubungilah Bagian Hukum agar membantu Anda dalam melaksanakan uji tuntas. Melalui proses ini Anda bisa mempelajari kembali berbagai kontrak dan dokumen lain yang relevan, mewawancarai orang-orang penting dan memperoleh gambaran serta jaminan mengenai bisnis ini. Proses ini akan membantu menjamin bahwa kontrak dari pihak ketiga tidak didasarkan pada hubungan yang bersifat korup.

## **PERTANYAAN YANG SERING DIKEMUKAKAN (FAQ)**

### **Apakah suap atau *kickback* itu tepatnya?**

Penyuapan pada umumnya dapat dijabarkan sebagai menawarkan atau menerima segala bentuk pembayaran, hadiah, pinjaman, biaya, imbalan atau keuntungan atau pertimbangan lain kepada atau dari siapa saja sebagai bujukan untuk melakukan suatu tindakan, tidak melakukan suatu tindakan, atau untuk mempengaruhi suatu keputusan. Misalnya, suatu pembayaran dalam bentuk uang agar (a) mendapatkan, mempertahankan atau mengelola bisnis, (b) memperoleh keuntungan yang tidak semestinya atau tidak wajar dalam pelaksanaan bisnis (seperti penerapan pajak yang menguntungkan), atau (c) mempengaruhi penilaian atau tindakan pihak ketiga atau memberikan hasil atau tindakan yang diinginkan adalah suatu penyuapan. *Kickback* adalah suatu jenis penyuapan tertentu. *Kickback* adalah pengembalian yang bersifat tidak etis atau tidak legal dari sebagian pembayaran yang telah dilakukan sebagai bagian dari transaksi bisnis yang sah. Misalnya, pemasok yang tidak etis mungkin sepakat untuk memberi seorang *purchasing manager* sejumlah uang sebagai ganti pemberian kontrak pengadaan dari manajer tersebut.

### **Apakah pantas untuk memberi jasa baik atau hadiah kepada seseorang daripada uang sebagai imbalan atas persetujuan mereka untuk melakukan sesuatu bagi Eaton?**

Tidak. Suap, *kickback* dan bentuk pembayaran lain yang korup bisa terjadi dalam berbagai bentuk dan tidak hanya dalam pemberian uang. Ini bisa termasuk hal-hal seperti

- memberi pekerjaan kepada sanak keluarga penerima suap,
- menjanjikan pekerjaan setelah pensiun dari jabatan di pemerintahan, atau
- hadiah-hadiah yang berlebihan dan mewah atau hadiah dalam bentuk hiburan dewasa

Pastikanlah bahwa hadiah, hiburan dan perjalanan yang diberikan kepada pejabat pemerintah, demikian pula kepada pegawai perusahaan swasta, tidak dapat dianggap sebagai suap atau bentuk pembayaran korup lainnya. Lihatlah Kebijakan Hadiah dan Hiburan di Seluruh Dunia untuk mendapatkan petunjuk tentang penawaran atau penerimaan hadiah, hiburan atau perjalanan yang pantas yang melibatkan pihak lain.

### **Bagaimana dengan sumbangan amal? Bagaimana hal ini dianggap tidak pantas?**

Pegawai harus menghindari pemberian sumbangan amal atau sponsor yang bisa merupakan sarana terselubung penyyuapan atau pembayaran korup lain. Misalnya, seorang pejabat yang korup mungkin mengisyaratkan bahwa sebelum kita dapat dipertimbangkan untuk memperoleh bisnis kita harus memberi sumbangan amal yang dipilih pejabat tersebut. Dapatkanlah persetujuan dari Bagian Hukum sebelum memberi sumbangan semacam itu. Kita perlu memastikan bahwa: (a) badan amal tersebut merupakan badan yang resmi; (b) pembayaran tidak akan diselewengkan kepada atau jika tidak akan menguntungkan pejabat tersebut atau keluarganya; (c) sumbangan tersebut transparan dan akan dicatat dengan semestinya dalam catatan keuangan kita; (d) perjanjian sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku; dan e) sumbangan bukan merupakan imbalan atas keputusan yang menguntungkan yang dibuat oleh pemohon sumbangan.

**Apakah pantas untuk memberikan faktur penjualan yang menunjukkan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari jumlah yang sesungguhnya ditagih kepada seorang pelanggan?**

Tidak. Semua faktur penjualan yang kita berikan kepada pelanggan harus mencerminkan harga yang sebenarnya dari produk terjual yang tertera pada faktur penjualan. Inilah yang sebenarnya tanpa menghiraukan alasan apa pun yang diberikan oleh pelanggan mengenai tujuan penggunaan bukti penjualan tersebut.

**Siapakah yang dimaksud dengan pejabat pemerintah? Jika perusahaan pelanggan dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, apakah *purchasing manager* perusahaan itu seorang pejabat pemerintah?**

Istilah “pejabat pemerintah” itu luas. Istilah ini mencakup semua pegawai, dari semua tingkatan, suatu departemen atau badan pemerintah, baik itu merupakan badan eksekutif, legislatif atau yudikatif. Pejabat dan pegawai perusahaan yang berada dalam kepemilikan atau kontrol pemerintah juga dianggap “pejabat pemerintah.” Maka, istilah tersebut mencakup tidak hanya individu-individu seperti para pejabat yang dipilih, inspektur bea cukai dan pajak dan pejabat pengadaan pemerintah, tetapi juga para pegawai badan-badan usaha milik pemerintah. Istilah ini juga mencakup: (a) siapa pun yang menduduki jabatan resmi di organisasi, departemen, atau badan pemerintah, (b) para pejabat atau pegawai organisasi internasional publik, seperti Badan Moneter Internasional (IMF), Uni Eropa (EU) dan Bank Dunia (WB), dan (c) partai-partai politik negara asing, pengurus partai, atau calon-calon pejabat negara. Harap diingat, Kebijakan ini melarang penawaran, penerimaan atau pemberian uang suap, *kickback* dan pembayaran lain yang korup kepada siapa pun, baik kepada pejabat pemerintah maupun bukan.

**Dalam beberapa bisnis adalah hal biasa untuk menggaji seorang agen pihak ketiga agar membantu dalam mengembangkan dan mengelola bisnis. Tanda-tanda bahaya apa yang harus dipertimbangkan oleh pegawai untuk**



**memastikan bahwa agen tersebut tidak melakukan pemberian uang yang tidak wajar?**

- Uji Tuntas (*Due Diligence*) terhadap calon mitra bisnis adalah penting karena berbagai pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atas nama Eaton bisa menjadikan Eaton dikenai tanggung jawab yang sama dengan jika Eaton telah melakukan pembayaran itu sendiri. Pastikanlah agar calon mitra bisnis merupakan suatu organisasi resmi, yang memiliki kecakapan, kemampuan, sumber daya dan kompetensi untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan baik mitra bisnis, maupun pegawai atau afiliasinya, tidak pernah atau tidak mungkin akan melakukan pembayaran yang tidak wajar. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada diri Anda sendiri akan membantu Anda waspada terhadap kemungkinan adanya masalah pembayaran yang korup yang melibatkan pihak ketiga:
- Bagaimana reputasi pihak ketiga, terutama sehubungan dengan korupsi?
- Apakah pihak ketiga tersebut mempunyai hubungan keluarga atau bisnis dengan seorang pejabat pemerintah?
- Jika berbentuk suatu badan, apakah pihak ketiga tersebut dimiliki oleh pejabat pemerintah?
- Jika perorangan, apakah pihak ketiga tersebut pada saat ini, atau pernah, menjadi pejabat pemerintah?
- Apakah pihak ketiga tersebut telah direkomendasikan oleh seorang pejabat pemerintah?
- Apakah pihak ketiga tersebut mempunyai staf, keahlian, fasilitas dan sumber daya lain yang mencukupi untuk melaksanakan pelayanan yang diperlukan?
- Apakah bayaran, komisi atau kompensasi lain untuk pihak ketiga layak dan konsisten dengan tarif pasar untuk jasa atau perjanjian serupa di lokasi itu?
- Apakah pihak ketiga tersebut meminta pembayaran tunai, bonus yang tidak wajar, pembayaran di muka dalam jumlah besar, atau proses pembayaran yang tidak wajar dalam bentuk apa saja, misalnya pembayaran yang dilakukan di luar negeri atau ke akun alternatif yang tidak dibukukan?
- Apakah pihak ketiga memahami dan menyatakan patuh terhadap kebijakan Eaton yang melarang pembayaran-pembayaran yang korup?
- Apakah pihak ketiga tersebut pernah dikenai pengusutan, penyelidikan informal, atau tindakan pengawasan terkait korupsi?

Pada akhirnya, perlu dilaksanakan uji tuntas dalam pengawasan dan peninjauan terhadap tindakan-tindakan mitra bisnis serta dalam pelaksanaan kewajiban-kewajibannya selama masa perjanjian tersebut sehingga segala persoalan dapat segera diidentifikasi dan ditanggapi.

Bagian Hukum dapat membantu memberi panduan dalam upaya Anda melakukan uji tuntas dan menilai hasil uji tuntas Anda.

**Saya cukup puas dengan uji tuntas terhadap calon mitra bisnis, tetapi ketentuan bisnis seperti apa yang harus saya masukkan ke dalam perjanjian dengan mitra ini?**

Bagian Hukum dapat membantu Anda dalam hal ini, tetapi pada umumnya, ketentuan-ketentuannya akan mencakup: (a) penjabaran anti-korupsi, jaminan dan kesepakatan sehubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang anti korupsi, termasuk FCPA; (b) hak untuk melaksanakan audit terhadap pembukuan dan dokumen-dokumen mitra bisnis tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap penjabaran, jaminan dan kesepakatan ini; dan (c) hak untuk memutuskan kemitraan bisnis ini sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang anti korupsi atau penjabaran, jaminan dan kesepakatan terhadap perjanjian yang berhubungan dengan hal-hal ini.

**Bagaimana seyogianya saya menanggapi permintaan akan pembayaran yang korup atau penawaran untuk menerima pembayaran yang korup?**

Bahkan dengan reputasi Eaton, Kode Etik kita dan tujuan baik kita, dalam melakukan pekerjaan beberapa di antara kita dapat mengalami situasi ketika kita menyadari bahwa seorang calon pelanggan atau pejabat mengharapkan suap atau pembayaran korup lainnya, atau menawarkan *kickback*. Setelah langkah awal yang berupa penolakan terhadap permintaan atau tawaran tersebut, hendaklah selalu minta bantuan secara internal. Supervisor Anda atau manajer Eaton lain dapat berupaya menghubungi organisasi yang menjadi sumber permintaan yang tidak wajar itu dan membawanya ke tingkatan yang tertinggi.

Selain itu, pertimbangkanlah hal-hal berikut ini dalam interaksi bisnis Anda:

- Jalinlah Hubungan – Tekankanlah pada (situasi) “menang-menang”.
- Tekankanlah bahwa Anda siap bekerja sekeras mungkin bersama pelanggan, penjual (*vendor*) atau pejabat untuk mencapai menang-menang yang konsisten dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kita yang tinggi.
- Bahaslah pentingnya nilai-nilai, integritas dan cara-cara Eaton dalam berbisnis dengan benar.
- Bahaslah apa saja yang dapat disumbangkan oleh Eaton: Teknologi, Investasi, Keahlian, Pelatihan, Pekerjaan, dan Pertumbuhan.
- Dalam membahas nilai-nilai kita, komunikasikanlah apa yang kita harapkan dan bahwa kita mengharapkan para pegawai, mitra bisnis, penjual, kontraktor dan pejabat bertindak konsisten dengan nilai-nilai ini.
- Tekankanlah pada pejabat-pejabat setempat bahwa kita berinvestasi dalam masyarakat mereka karena kita yakin akan kemampuan mereka dalam melindungi agar kita tidak diharapkan memberikan suap atau korupsi.

- Berilah penjelasan bahwa undang-undang mengenakan denda dan hukuman berat terhadap penyuapan pejabat pemerintah dan penyimpangan pembukuan dari pembayaran yang tidak wajar.
- Kirimkanlah pesan yang sama dengan konsisten: “Inilah kami”; “Inilah cara kami berbisnis”.
- Upayakanlah untuk memastikan agar reputasi Anda dan Eaton didahulukan. Singkirkanlah harapan dan bahwa tidak ada gunanya untuk meminta.

Akhirnya, tinggalkanlah jika dianggap perlu, karena Anda tahu Anda telah membuat pilihan yang benar. Eaton tidak menginginkan atau memerlukan bisnis yang tidak dapat diperoleh secara etis dan legal.